Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan (KEAT)
Volume. 1, Nomor. 1, Maret 2024
e-ISSN : 3046-9414; dan p-ISSN : 3046-8736; Hal 23-37
DOI: https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.691
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/KEAT

Utang Luar Negeri: Menelisik Faktor Penyebab, Kondisi di Indonesia, dan Dampaknya Terhadap Perekonomian

Nova Adella[1*], Rani Wulandari[2], Alfa Rizki Saputra[3], Heni Noviarita[4]
[1-4]Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Alamat: Jalan Letnal Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
*Korespondensi penulis: nova.adella021@gmail.com**

Abstract. *Foreign debt (ULN) is one of the important issues in the dynamics of the global economy, especially for developing countries. This study aims to analyze the causal factors, conditions of ULN in Indonesia, and its impact on the economy. Qualitative research methods with a literature approach were used to collect data from various written sources. The results of the study indicate that the factors causing ULN in Indonesia include the inability to provide sufficient development funds, an imbalance between investment and savings, and dependence on imported goods. The impact of ULN on the Indonesian economy is divided into positive and negative impacts. The positive impacts include effective sources of development financing, recognition of the country's ability to pay off debt, the establishment of relations between countries, and encouragement of domestic policy improvements. The negative impacts include the burden on the APBN, reduction in spending strategies, the influence of creditor countries in policy making, and the stigma of being a failed state. The study concludes that ULN in Indonesia needs to be managed wisely by considering long-term risks. Some recommended solutions include delaying principal debt payments, changing payment obligations, and reducing principal debt. This study provides important information for policy stakeholders and the Indonesian public in understanding the importance of wise ULN management to encourage sustainable economic growth and improve people's welfare.*

Keywords: *Foreign Debt, Foreign Loans, Financing*

Abstrak. Utang luar negeri (ULN) menjadi salah satu isu penting dalam dinamika perekonomian global, terutama bagi negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab, kondisi ULN di Indonesia, serta dampaknya terhadap perekonomian. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab ULN di Indonesia meliputi ketidakmampuan menyediakan dana pembangunan yang cukup, ketidakseimbangan investasi dan tabungan, serta ketergantungan terhadap barang impor. Dampak ULN terhadap perekonomian Indonesia terbagi atas dampak positif dan negatif. Dampak positifnya meliputi sumber pembiayaan pembangunan yang efektif, pengakuan kemampuan negara dalam melunasi hutang, terjalinnya hubungan antar negara, dan dorongan perbaikan kebijakan dalam negeri. Dampak negatifnya antara lain beban pada APBN, pengurangan strategi pengeluaran, pengaruh negara pemberi utang dalam pengambilan kebijakan, dan stigma sebagai negara gagal. Penelitian menyimpulkan bahwa ULN di Indonesia perlu dikelola dengan bijaksana dengan memperhatikan risiko jangka panjang. Beberapa rekomendasi solusi seperti penundaan pembayaran pokok utang, perubahan kewajiban pembayaran, dan pengurangan pokok utang. Penelitian ini memberikan informasi penting bagi para pemangku kepentingan kebijakan dan masyarakat Indonesia dalam memahami pentingnya pengelolaan ULN yang bijaksana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat.

Kata kunci: Utang Luar Negeri, Pinjaman Luar negeri, Pembiayaan

1. LATAR BELAKANG

Dalam dinamika perekonomian global, utang luar negeri telah menjadi masalah besar yang mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi banyak negara. Banyak Negara, terutama negara berkembang, tergantung dengan utang luar negeri sebagai cara utama dalam

Received: November 16, 2024; Revised: November 30,2024; Accepted: Desember 21, 2024; Published: Desember 23, 2024

melakukan pembiayaan pembangunan, peningkatan infrastruktur, dan dukungan program sosial. Namun, utang yang tidak bijaksana dapat membahayakan kesehatan ekonomi negara.

Sumber daya yang memadai diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, bukti telah menunjukkan bahwa kepemilikan sumber daya ekonomi di setiap negara berbeda. Negara-negara yang tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonominya dengan tabungan dalam negeri yang cukup dapat mencari pendanaan dari luar negeri atau negara-negara lain. Bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga selalu bergantung pada dana asing, terutama dari tahun 1835 hingga 1860. Ini juga berlaku untuk Uni Soviet sebelum pecah, tepatnya tiga puluh tahun sebelum Perang Dunia I.(Arsyad 2022)

Strategi nasional pembangunan Indonesia telah mengintegrasikan utang luar negeri. Sejak reformasi ekonomi pada akhir tahun 1990-an, pemerintah Indonesia sudah aktif memanfaatkan utang luar negeri dalam mendorong peningkatan perekonomian serta kemakmuran setiap individu. Meskipun utang luar negeri menawarkan manfaat jangka pendek, suatu negara harus mempertimbangkan dampak utang tersebut terhadap perekonomian nasionalnya dalam jangka panjang.

Pemerintah dan pengamat ekonomi terus berdebat tentang Utang Luar Negeri (ULN). Pengamat ekonomi berpendapat bahwa kondisi ULN pemerintah sudah terpengaruh jika dilihat dari rasio utang terhadap PDB, kondisi Debt Service Ratio (DSR), penggunaan utang, dan defisit keseimbangan primer. Sebaliknya, pemerintah berpendapat bahwa kondisi ULN masih aman jika dilihat dari rasio utang terhadap PDB, jangka waktu utang, dan jangka waktu utang.(Irawan 2020)

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*), pinjaman luar negeri dapat mencakup pinjaman dari negara lain, baik pemerintah maupun swasta, yang dapat ditransaksikan dengan mata uang negara pemberi pinjaman. Berdasarkan Bank Indonesia, utang luar negeri diartikan dengan antara utang penduduk (penduduk) dan non-penduduk di suatu wilayah teritori ekonomi. Konsep dan terminologi utang luar negeri berlandaskan dengan "IMF's *External Debt Statistics: Guide for compilers and Users* (2003)":

"Utang luar negeri bruto, pada waktu tertentu, adalah jumlah terutang dari utang lancar riil, dan bukan utang bersyarat yang mengharuskan pembayaran pokok dan / atau bunga oleh debitur di masa mendatang dan menjadi utang kepada bukan penduduk oleh penduduk suatu perekonomian."

Menurut definisi di atas, utang luar negeri (ULN) harus melibatkan masyarakat dengan utang bukan penduduk, yang pembayaran utangnya mencakup pembayaran pokok dan/atau bunga di masa depan. Dengan kata lain, ULN wajib memperlibatkan penduduk yang memiliki utang dari bukan penduduk, baik pada mata uang asing ataupun mata uang lokal. Jika negara tidak memiliki tabungan dalam negeri yang cukup dalam menambah pertumbuhan perekonomian, mereka biasanya menutup pendanaan melalui pencarian dana dari luar negeri.(Darmawan 2022)

Teori Laffer Curve mengatakan bahwa utang harus di tingkat yang wajar dalam hal utang di luar negeri. Selama batas tertentu, penambahan utang dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun saat utang lebih dari batas tersebut, kemudian berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi (Aini 2023)

Utang pemerintah pada dasarnya dikarenakan tiga komponen utama: kesenjangan anggaran (*budget gap*), investasi dan tabungan (*invesment- saving gap*), dan transaksi berjalan (*current account gap*). Kesenjangan anggaran dialami saat penghasilan pemerintah lebih rendah dari pengeluarannya. Kesenjangan investasi serta tabungan terjadi saat tabungan dalam negeri tidak mencukupi untuk membiayai investasi dalam pembangunan.

Berdasarkan penuturan Yuswar dan Mulyadi (2003), utang luar negeri berfungsi dalam mencukupi kepelruan impor barang modal serta barang setengah jadi dan mendorong pertumbuhan produk ekspor. Di samping itu, Tulus (2011) menyatakan jika negara berkembang memiliki banyak utang luar negeri karena nilai ekspor dan impor yang tinggi, yang membuat negara tidak dapat membayar utang luar negeri yang memiliki waktu yang tepat . Akibatnya, utang luar negeri menjadi lebih berat bagi negara berkembang (Bilatula et al. 2023)

Undang-Undang Perbendaharaan Negara mengatur utang negara ini. Hutang luar negeri dapat berupa pinjaman tunai atau pinjaman kegiatan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 mengenai tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan hibah. Dan juga, sumber hutang ini dapat asalnya dari kreditor multilateral, bilateral, swasta asing, serta lembaga penjamin kredit ekspor (Hasan 2019)

Hibah dan utang/pinjaman adalah dua kategori sumber dana asing. Berbeda dengan utang, hibah diberikan dengan tidak adanya ketentuan yang mengikat. Utang luar negeri terbagi ke dalam dua kategori: utang jangka panjang serta utang jangka pendek. Uang jangka panjang disebut utang jangka pendek, dan jangka utang pendek yang diberikan kurang dari sepuluh tahun.

Karena utang luar negeri tidak selalu dilakukan pencairan pada wujud dana yang bebas dipergunakan oleh negara kreditur, utang jenis 3 yang diberikan Bank Dunia terhadap

Indonesia tidak senantiasa memberikan keuntungan kepada Indonesia. Hal ini sebab dana jenis 3 hanya dapat dipergunakan dalam melakukan pembelian produk yang sesuai dan berdasarkan pada permintaan Bank Dunia. Selain itu, Indonesia mungkin pun tidak memerlukan konsultasi. Faktanya, mereka menggunakan utang internasional yang diberikan oleh Bank Dunia untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan, seperti biaya konsultan dan perjalanan. Meskipun pemerintah Indonesia harus membayar utang tersebut secara keseluruhan. Selain itu, jenis utang ini lebih memberikan keuntungan kepada negara kreditor sebab memiliki kemungkinan pengalihan sumber daya neto ke negara mereka. Indonesi wajib untuk melakukan impor terus menerus produk yang sama dalam mempertahankan produksi di negaranya yang sistemnya tidak bisa dilakukan perubahan pada waktu singkat. Akibatnya, sebagai negara debitur, Indonesia akan bergantung pada negara kreditor (Hamid 2018)

3. METODE PENELITIAN

Studi yang dilaksanakan mempergunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang memiliki sifat deskriptif-analitis. Data dilakukan pengumpulan dengan studi literatur serta analisis dokumen dari beragam sumber tertulis, seperti buku, artikel, laporan, dan dokumen resmi. Analisis data dilaksanakan mempergunakan metode deskriptif dan analisis tematik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab Negara Sedang Berkembang (NSB) Terus berutang

Untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan kegiatan investasi, pembangunan suatu negara memerlukan modal yang cukup. Namun, sebagian besar Negara Sedang Berkembang tidak mampu menyediakan dana yang cukup untuk tujuan tersebut. Akibatnya, NSB terus mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Faktor-faktor berikut bertanggung jawab atas ketidakmampuan negara -negara berkembang ini, antara lain:

1. Kurangnya kesenjangan investasi dan tabungan dalam negeri Tingkat pendapatan penduduk yang rendah serta sistem keuangan yang tidak memadai merupakan penyebab tidak cukupnya tabungan ini.
2. Kurangnya kemampuan beberapa negara untuk menghasilkan uang asing. Sementara kemampuan Negara Sedang Berkembang (NSB) untuk memperoleh devisa masih rendah, transaksi perdagangan internasional membutuhkan devisa.

berdasarkan pendekatan *two gap model* yang dikemukakan oleh Todaro (2003), utang luar negeri ada karena keperluan dalam melakukan penutupan sejumlah kesenjangan berikut:

a. Perbedaan pada tabungan dalam negeri dengan kebutuhan investasi Tingkat pendapatan yang masih rendah menyebabkan celah dalam tabungan domestik.
b. Perbedaan antara aliran modal masuk dan keluar, atau defisit neraca pembayaran Kelemahan struktural NSB, termasuk ketergantungan terhadap barang modal impor karena produk tersebut tidak dapat diproduksi secara lokal, menyebabkan ketidaksesuaian neraca pembayaran.
c. Perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran anggaran negara Ini terjadi karena sumber pembiayaan NSB seperti pajak, hasil BUMN, dan hasil ekspor belum dimanfaatkan secara optimal.
d. Selain itu, ada perbedaan antara kebutuhan tenaga kerja ahli dan kebutuhan aktual yang terpenuhi dalam pembangunan. Banyak kali, utang luar negeri membutuhkan tenaga profesional dari negara pemberi pinjaman. Ini akan berfungsi sebagai cara untuk mengisi kekurangan tenaga kerja ahli di negara ini.

Sumber lain memberikan pernyataan jika peningkatan utang luar negeri juga dapat disebabkan oleh kemiskinan yang parah serta berkepanjangan pada beberapa negara berkembang, yang diikuti oleh persoalan sosial seperti kelaparan serta tunawisma. Sedangkan NSB tidak mempunyai modal finansial yang memadai dalam mengatasi masalah kemiskinan masyarakatnya, utang luar negeri akhirnya sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan.

Bagi NSB, utang luar negeri semula adalah sebagai salah satu komponen penting yang diprediksi mampu memberikan dorongan pada pembangunan NSB. Tetapi faktanya adalah bahwa banyak NSB semakin terjerat pada masalah utang karena utang luar negeri. Sejumlah negara yang awalnya diprediksi dapat lepas landas malah akan terikat serta bergantung terhadap utang luar negeri pada tahun 1970-an dan 1990-an. Sampai sekarang ini, NSB Amerika Latin, misalnya Brasil dan Argentina, yang semula diproyeksikan akan memulai lebih awal daripada NSB lain di seluruh dunia, masih mempunyai rasio utang luar negeri terhadap ekspor yang lebih dari 100%, bersama yang memiliki taraf utang pada GNI (Gross National Income) yang cukup besar pula.

Bisa dikatakan, utang luar negeri tidak selalu memberikan bantuan pada pembangunan negara. Dan juga, utang luar negeri cenderung sebagai beban untuk NSB karena beberapa alasan. dimana sebagian besar utang yang didapatkan oleh NSB pada wujud USD, karena jumlah USD yang ada pada pasar internasional relatif lebih sedikit dibandingkan mata uang asing yang lain misalnya Yen, Deutschmark, atau Poundsterling. Akibatnya, NSB kesulitan mendapatkan USD (Arsyad 2022)

Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Perekonomian

Akumulasi modal dan peningkatan faktor produktivitas total adalah dua cara utama Utang Luar Negeri (ULN) mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah ULN dapat menguntungkan pertumbuhan ekonomi jika berada dalam batas wajar. Menurut model neo-klasik tradisional, mobilitas modal ada; negara yang meminjam ULN untuk investasi dengan produk marginal modal yang lebih tinggi daripada suku bunga yang dibayar akan mendapatkan insentif. Sebaliknya, ULN dapat menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi jika terlalu tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa utang yang berlebihan *(teori overhang)* hutang menyebabkan banyak krisis.

Dalam Darmawan (2022), teori efek overhang utang, yang didasarkan pada penelitian oleh Krugman (1988) dan Sachs (1989), mengatakan bahwa situasi utang yang tinggi serta nilai sekarang dari sumber pembayaran utang yang tidak memdai akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kurva utang dapat digunakan untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ULN. Secara teoritis, utang luar negeri harus dalam jumlah yang wajar; penambahan utang dapat menguntungkan hingga batas tertentu. Namun, penambahan utang justru berdampak negatif setelah melewati batas tersebut.

Dalam literatur ekonomi, pengaruh ULN terhadap pertumbuhan ekonomi dibahas melalui tiga jalur: (1) efek *debt overhang*; (2) efek ketidakpastian; dan (3) efek keterbatasan likuiditas. Efek crowding out, di mana utang pemerintah meningkat untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dapat terjadi jika utang pemerintah meningkat, yang berdampak pada sektor swasta dengan meningkatnya suku bunga. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang jika pengelolaan ULN tidak dilakukan dengan baik.

Pada awalnya, utang asing membantu Indonesia menutupi defisit anggaran dan mempercepat pertumbuhannya. Namun, karena jumlah pinjaman baru yang lebih besar daripada cicilan utang, anggaran mulai membengkak pada tahun 1980-an. Hal ini mengakibatkan aliran modal negatif dari negara maju ke negara berkembang. Penurunan investasi dan anggaran pemerintah terbebani oleh pembayaran ULN yang tinggi. *Debt Overhang* terjadi ketika pembayaran utang yang tinggi menurunkan investasi dan inflow modal, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.(Darmawan 2022)

Sabil dkk (2022) dalam bukunya “perekonomian Indonesia” memaparkan beberapa dampak positif dan negatif Utang luar negeri untuk perekonomian sebuah negara. berikut pengaruh positif dari utang luar negeri yaitu:

1. Menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang lebih efektif dibandingkan pajak serta pencetakan uang.

Pajak mengurangi pendapatan konsumen, yang dianggap sebagai kebocoran dalam sirkulasi kegiatan ekonomi dalam teori ekonomi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jika pengeluaran pemerintah tidak seimbang. Sebaliknya, pencetakan uang dapat menyebabkan inflasi, yang berdampak negatif dengan mengalami penurunan daya beli masyarakat, meningkatkan spekulasi, serta melebarkan disparitas distribusi pendapatan. Ini berarti bahwa setiap individu berpenghasilan tinggi memiliki aset yang nilainya meningkat, sementara masyarakat miskin hanya memiliki uang tunai.

2. Menjadi pengakuan dari negara lain terhadap kapasitas negara debitur untuk melunasi utang dan kinerja perekonomiannya.

Utang luar negeri yang diberikan oleh kreditor dapat dianggap sebagai pengakuan positif dari pihak kreditur terhadap kapasitas Negara debitur dalam melakukan pembayaran lagi utang tersebut. Itu pun mengindikasikan jika performa perekonomian Negara tersebut cukup baik maka mampu memenuhi kewajiban utangnya.

3. Menjadi pengikat hubungan antar negara. Melalui adanya utang luar negeri, hubungan ekonomi serta politik antara dua negara akan semakin kuat.

Negara-negara tidak dapat menutup diri di era globalisasi. Menurut pada teori perdagangan internasional, semua negara sebaiknya tidak melakukan produksi seluruh barang serta jasanya secara mandiri; sebaliknya, mereka harus berkonsentrasi pada barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif, yang berarti mereka dapat memproduksinya dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Barang dan jasa lainnya sebaiknya dilakukan impor dari negara lain. Sejumlah negara yang berpartisipasi pada perdagangan internasional kemudian memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan jika mereka melaksanakan proteksi atau menutup diri. Pengeluaran asing akan meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan global.

4. Sebagai pendorong untuk memperbaiki peraturan domestik yang tidak cukup baik.

Kerap kali, sejumlah negara serta institusi pemberi utang luar negeri menggunakan tekanan dalam mendorong perbaikan kebijakan dalam negeri yang tidak efisien. Pembatasan

kebebasan berpendapat serta praktik KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) adalah contoh kebijakan yang buruk (Sabil et al. 2022).

Di sisi lain dari memiliki pengaruh positif, utang luar negeri pun membawa pengaruh negatif. Sejumlah pengaruh negatif dari utang luar negeri itu yaitu:

1. Membebani APBN

Saat suatu negara menerima utang luar negeri, memang ada dana yang diperoleh serta berbagai manfaat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, pada saat wajib melakukan pembayaran bunga serta cicilan, hal ini kemudian memberikan beban kepada APBN. Kerap kali, utang luar negeri yang awalnya diinginkan menjadi pelengkap pembiayaan domestik justru menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan sebuah negara.

2. Mengurangi pengeluaran pada sejumlah hal strategis dan penting.

Jika pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri dilakukan, alokasi dana kemudian dikurangi pada pengeluaran yang lebih strategis serta penting, seperti subsidi di berbagai sektor (pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan lainnya) dan pembangunan infrastruktur.

3. Pengaruh dari negara pemberi utang dalam pengambilan kebijakan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, negara atau lembaga pemberi utang luar negeri memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan negara pengutang. Jika kritik terhadap kebijakan bertujuan untuk perbaikan, hal ini mungkin bermanfaat. Namun, jika kebijakan yang dikritik sudah baik, tentu akan berdampak negatif pada negara debitur.

4. Stigma sebagai negara gagal

Seperti yang disebutkan sebelumnya, negara atau lembaga pemberi utang luar negeri memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan negara pengutang. Jika kritik terhadap kebijakan bertujuan untuk perbaikan, hal ini mungkin bermanfaat. Namun, jika kebijakan yang dikritik sudah baik, pastinya dapat bepengaruh negatif pada negara debitur.

Secara keseluruhan, utang luar negeri, jika dikelola dengan bijaksana, dapat bermanfaat untuk mendukung dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun, negara debitur harus memperhatikan risiko jangka panjang yang mungkin muncul sebagai akibat ketergantungan pada pembiayaan eksternal ini (Sabil et al. 2022)

Kondisi Utang luar Negeri Indonesia

Problem utang luar negeri telah sebagai salah satu masalah penting selama perkembangan ekonomi Indonesia. Selama beberapa dekade terakhir, peningkatan ekonomi yang diantisipasi selalu diiringi dengan peningkatan utang internasional. Fenomena ini menarik perhatian karena kompleksitas dan konsekuensi yang berkaitan pada peningkatan utang struktural dan sosial-ekonomi.

Pembangunan ekonomi membutuhkan banyak modal pembiayaan, yang biasanya berasal dari pendapatan domestik, misalnya pendapatan pajak serta non pajak. Tetapi, kerap kali Negara menghadapi keadaan yang mana peapatan tidak memadai dalam seluruh belanja pemerintah yang diperlukan untuk menggerakkan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan defisit, atau perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Pendanaan utang luar negeri dalam menutupi defisit mempunyai sejumlah keuntungan diperbandingan pada pilihan pembiayaan yang lain (Friska Cahya Yumanda dan Juliannisa 2023) Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa itu bisa didapatkan dengancepat terlebih oleh sejumlah negara yang berkembang serta praktisnya, yang memiliki kemungkinan pemerintah dalam mempergunakannya secara langsung dalam mendorong pembangunan saat negara terjadi defisit anggaran. Tetapi, utang luar negeri pun menciptakan risiko, terlebih saat tanggungjawab membayar utang serta bunganya akan begitu tinggi serta lebih dari kapasitas neraca pembayaran negara. Sekarang ini, negara dapat kesulitan melakukan pembayaran utang yang jatuh tempu serta berkemungkinan harus berhutang lagi guna melakukan pelunasan utang yang telah terdapat (Cahyaningrum et al. 2022)

Grafik 1 Pergerakan ULN Indonesia Tahun 2019-Agustus 2024



Sumber: Bank Indonesia, data diolah 2024

Dari grafik 1 dapat diketahui jumlah Utang Luar Negeri (ULN) di Indonesia pada tahun 2019 hingga 403,563 Juta USD, lalu mengalami peningkatan menjadi 416,935 Juta USD di tahun 2020, dan Mencapai 413,972 juta USD di tahun 2021. Di tahun 2022, menurun menjadi 397,131 juta USD, serta sampai bulan desember 2023 hingga 408,205 juta USD dan Agustus 2024 terakhir mencapai 425,058 juta USD atau secara tahunan tumbuh sebesar 7,3% (Bank

Indonesia 2024) Dari grafik tersebut posisi ULN mengalami peningkatan pada agustus 2024, perkembangan tersebut selain bersumber dari sektor publik dan sektor swasta, pun ditentukan oleh faktor yang melemahkan mata uang dolar AS pada sebagian besar mata uang global, termasuk rupiah. ULN Indonesia sempat mengalami kenaikan signifikan akibat Covid-19, namun meski mengalami peningkatan, hingga agustus 2024, menurut Bank Indonesia ULN Indonesia tetap terkendali (Sari et al. 2023)

Untuk menutupi kekurangan, Indonesia menggunakan utang sebagai salah satu pilar pembangunan. Pembiayaan utang luar negeri masih sangat besar, bahkan saat Indonesia mulai menerapkan sistem anggaran dengan defisit atau surplus. Namun, pemerintah selalu menyatakan dalam kebijakan ekonominya bahwa utang luar negeri hanyalah pelengkap. Di satu sisi, utang sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan dapat dianggap sebagai bukti bahwa negara tidak dapat meningkatkan sumber pendapatannya (seperti pajak) dan harus mencari sumber pembiayaan alternatif. Defisit anggaran dan defisit transaksi berlangsung saat ini yaitu defisit yang paling jelas. Akibat defisit, pemerintah berusaha menutupinya dengan beberapa cara, tetapi hanya dengan pendapatan domestik mereka dapat menutupinya. Oleh karena itu, pemerintah meminjam dana dari luar negeri untuk memperbaiki keadaan dan juga untuk memberikan pembiayaan untuk pembangunan (Haris Istiawan Khan, Komala Sari, dan M. Kurniawan 2024). Jika digunakan dengan benar, utang dapat menjadi sumber pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan upaya pemerintah untuk mendapatkan utang atau pinjaman untuk membiayai pembangunan, khususnya infrastruktur. Hampir setiap negara berutang. Mereka berukuran besar, sedang, dan kecil. Masalahnya adalah tumpukan hutang yang terus mengalami peningkatan dari masa ke masa serta terus meningkat. Kemudian muncul bunga. Ini akan menjadi tantangan bagi generasi berikutnya (SR 2020)

Meskipun disebutkan bahwa utang luar negeri Indonesia terkendali, pemerintah dan perusahaan swasta harus tetap memperhatikan kebijakan dan strategi yang tepat terkait ULN agar posisi ULN Indonesia tetap terkendali dan dapat mengantisipasi kondisi yang mengganggu perekonomian di masa mendatang.

Solusi Utang Luar Negeri

Guna menurunkan banyaknya utang luar negeri yang sekarang ini sedang menjerat Indonesia, setidaknya ada tiga solusi potensial. Pertama, penundaan pembayaran angsuran pokok utang, yang juga dikenal sebagai rescheduling utang, kedua, perubahan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran pokok utang sebagai tanggungjawab untuk melakukan

tindakan tertentu (swap utang), serta ketiga, pokok utang dikurangi dengan program yang disebut dengan Inisiatif pada Negara-negara Miskin Yang Terjebak Utang.

Indonesia sudah tiga kali melakukan pengajuan penundaan untuk membayar utang terhadap forum sejumlah kreditor pada Paris Club sejak krisis moneter tahun 1998. Amerika Serikat dan Jerman telah menawarkan opsi kedua, tetapi pemerintah tidak mempertimbangkannya dengan baik. Sebab Indonesia tidak mencukupi ketentuan yang diperlukan pada alternatif ketiga, tidak mungkin digunakan. Apabila rasio utang luar negeri [ada ekspor di atas 150%, rasio utang pada penerimaan negara di atas 250%, rasio ekspor pada Produk Domestik Bruto di bawah 30%, serta rasio penerimaan negara pada PDB di bawah 15%, maka alternatif ketiga dapat digunakan.

Perlu diakui bahwa krisis ekonomi memiliki efek negatif dalam sektor keuangan dengan gangguan psikologis serta penurunan likuiditas. Pertumbuhan perekonomian yang melambat, banyak industri besar yang berada di ambang kebangkrutan, menurunnya kapasitas produksi, serta meningkatnya jumlah pengangguran (Umi et al. 2022)

Sebab dinilai tetap menciptakan keuntungan negara kreditur serta memberikan tekanan pada negara debitur, berbagai opsi di atas adalah opsi konservatif. Dalam sejumlah negara misalnya Argentina dan Meksiko, penyelesaian utang luar negeri dilakukan melalui metode yang lebih revolusioner. Tidak memiliki permintaan untuk menjadwalkan ulang namun meminta pemotongan utang Memang, kesuksesan kedua negara itu dalam pemotongan utang merupakan tindakan yang memiliki resiko, namun fakta bahwa utang mereka sangat besar bukan berarti mereka tidak berkemungkinan dalam melakukan pengambilan risiko terkait (Hamid 2018)

Untuk membiayai pembangunan, tabungan domestik Indonesia terbatas. Akibatnya, Indonesia masih bergantung pada ULN sebagai pembiayaan. Awalnya, ULN digunakan menjadi dana sampingan dalam melunasi tidak cukupnya dana pembangunan yang belum terbayar. Namun, seiring berjalannya waktu, ULN beralih peran menjadi sumber dana alternatif untuk mengurangi defisit fiskal negara.

Untuk menyelesaikan masalah ULN, pemerintah dan Bank Indonesia, sebagai bank sentral negara, harus melakukan berbagai tindakan penyelamatan. Salah satu tindakan yang diambil adalah melakukan disiplin anggaran fiskal, bernegosiasi terhadap sejumlah kreditur dalam menjadwalkan kembali ULN kepada debitur yang lebih panjang yang memiliki bunga yang cenderung rendah, melakukan pembelian obligasi rekapitulasi dalam melakukan penyelamatan industri perbankan dari sulitnya lukuiditas yag parah, serta melaksanakan negosiasi dengan para kreditur untuk menurunkan bunga. Selain tindakan tersebut, peran

pemerintah serta Bank Indonesia harus ditingkatkan dengan sejumlah opsi ketentuan di bawah ini:

1. Pembatasan Pinjaman Baru

Karena membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan yang signifikan, ULN membantu Indonesia menutup defisit APBN dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, ULN dapat menyebabkan masalah bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang membatasi pinjaman baru harus diterapkan dalam melakukan pembiayaan pada pengeluaran pemerintah yang produktif, misalnya dalam membangun infrastruktur dan mengembangkan pendidikan serta kesehatan. Pembatasan ini dimaksudkan guna menurunkan jumlah pinjaman yang memiliki sifat program atau produk kebijakan. Akibatnya, aoutput pinjaman baru diinginkan akan memiliki efek multiplier yang tinggi di masa depan serta mendorong peningkatan jumlah pinjaman yang diberikan kepada pemerintah. Dan juga, kebijakan wajib diberlakukan pada pinjaman baru yang memiliki suku bunga yang lebih rendah, masa pinjaman yang lebih lama, serta tidak terdapat persyaratan yang memberatkan pemerintah. Pembatasan harus diterapkan pada utang multilateral dan bilateral, serta pada jenis pinjaman itu sendiri.

2. Peningkatan Penerimaan Pajak (*Tax Ratio*)

Jika tidak didorong oleh usaha yang besar untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, tujuan menghapus semua ULN Indonesia tampaknya cukup sulit dicapai. Penambahan pendapatan negara dari sektor perpajakan bisa menurunkan kebergantungan ULN Indonesia. Tax ratio Indonesia sekarang ini hanya senilai 12–13% dari rasio PDB, jauh di bawah Filipina serta negara tetangga yang lain.

3. Sinegi BUMN

Salah satu cara lain untuk mengurangi ULN adalah dengan melibatkan BUMN dalam penataan kembali dan memaksimalkan kinerjanya. Ini akan memungkinkan BUMN Indonesia untuk berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan negara. Ini dapat dicapai melalui pemaksimalan sumber daya dalam negeri yang ada pada BUMN, yang diharapkan dapat menghasilkan peningkatan keterlibatan pajak serta peningkatan deviden BUMN pada penerimaan negara.

4. Pengelolaan Utang

Ada beberapa cara untuk mengurangi beban ULN, seperti menunda pembayaran angsuran pokok utang (*debt rescheduling*), membuat penjadwalan kembali jatuh tempo dalam membayar utang serta bunga, dan membatalkan tanggungjawab melakukan pembayaran angsuran pokok utang menjadi tanggungjawab melakukan program atau proyek tertentu (*debt swap*) (Sari 2015)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Utang luar negeri (ULN) merupakan alat penting bagi negara, terutama yang sedang berkembang, untuk mendanai proyek pembangunan dan meningkatkan infrastruktur. Meskipun ULN dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup, penggunaan utang yang tidak bijaksana dapat menimbulkan risiko serius terhadap stabilitas ekonomi. Dalam konteks Indonesia, ULN telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional sejak reformasi ekonomi pada akhir 1990-an, dengan peningkatan signifikan dalam jumlah utang yang digunakan untuk berbagai keperluan.

Analisis menunjukkan bahwa ULN disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kesenjangan anggaran, kesenjangan investasi dan tabungan, serta kesenjangan transaksi berjalan. Terdapat pandangan yang berbeda mengenai dampak ULN terhadap perekonomian, di mana pandangan Ricardian berargumen bahwa ULN tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pandangan klasik dan Keynesian melihat potensi dampak negatif dan positifnya terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa sumber dan bentuk ULN bervariasi, termasuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dari lembaga internasional maupun bilateral. Namun, tidak semua jenis utang menguntungkan bagi negara debitur, karena seringkali terdapat syarat-syarat yang membatasi penggunaan dana. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola utang dengan bijak agar manfaat jangka pendek tidak mengorbankan kesehatan ekonomi jangka panjang.

Penelitian ini membuktikan bahwa utang luar negeri merupakan solusi penting dalam pembiayaan pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun pemanfaatan utang luar negeri harus dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan mengantisipasi potensi masalah yang dapat muncul.

DAFTAR REFERENSI

Aini, W. (2023). Pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business, 3(1), 1–19.

Arsyad, L. (2022). Ekonomi pembangunan lanjutan (2nd ed.). Universitas Terbuka.

Bank Indonesia. (2024). Statistik utang luar negeri Indonesia (Oktober 2024).

Bilatula, D. Y. Y., Olilingo, F. Z., Payu, B. R., & Arham, M. A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri di Indonesia. Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan, 1(2), 1–9. https://doi.org/10.37905/jsep.v1i2.22173

Cahyaningrum, H., Nadzeva, G., Ramadhani, N. T., & Nurdiansyah, D. H. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri di Indonesia tahun 2015–2019. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, 21(1), 39–54. https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.39-54

Darmawan, I. (2022). Dampak utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi, 15(2), 57–69. https://doi.org/10.24071/jpea.v15i2.5077

Friska Cahya Yumanda, & Juliannisa, I. A. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri di Indonesia. JEMMA: Jurnal of Economic, Management, and Accounting, 6(2), 133–152.

Hamid, E. S. (2018). Perekonomian Indonesia (3rd ed.). Universitas Terbuka.

Hasan, M. (2019). Kajian tata kelola utang negara untuk pembangunan nasional. SEKNAS FITRA: Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran.

Irawan, T. T. (2020). Perekonomian Indonesia: Fakta, tantangan, dan kebijakan (1st ed.). Unpak Press.

Istiawan Khan, H., Sari, K., & Kurniawan, M. (2024). Pengaruh ekspor, impor, dan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2013–2022. Journal Economic Excellence Ibnu Sina, 2(2), 120–139. https://doi.org/10.59841/excellence.v2i2.1327

Sabil, M. D. M., Soeharjoto, S., Nusantara, A., Ardana, Y., Fahrika, A. I., Utami, S., Pradaning Ratri, A., Rahmawati, R., SBM, N., Malau, N. A., & Nawatmi, S. (2022). Perekonomian Indonesia (1st ed.). PT Global Eksekutif Teknologi.

Sari, R. (2015). Alternatif kebijakan pengentasan utang luar negeri. Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, VI(12), 13–16.

Sari, W. R., Andriani, A., Nabilla, F. L., & Putri, D. F. (2023). Perkembangan utang luar negeri Indonesia tahun 2019 sampai 2023 berjalan. Kampus Akademik Publishing Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 1(4), 72–78.

SR, A. A. (2020). Investasi, utang pemerintah dan kualitas pembangunan. Journal Koperasi dan Manajemen, 1(1), 57–69.

Umi, N. T., Apriani, R., Sari, M. P., Pundarika, R., & Noviarita, H. (2022). Dampak krisis ekonomi terhadap tingkat pertumbuhan di Indonesia dalam pandangan Islam. Salam (Islamic Economics Journal, 3(2), 101. https://doi.org/10.24042/slm.v3i2.10306